

ABSTRAK

KONTRADIKTIF ANTARA PUTUSAN PENGOSONGAN LAHAN DENGAN PERJANJIAN ANTARA PEMEGANG KEKANCINGAN DENGAN PEDAGANG KAKI LIMA GANDOMANAN DI KOTA YOGYAKARTA

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masalah yang timbul dari bidang pertanahan banyak menunjukkan konflik yang semakin kompleks, salah satunya adalah sengketa tanah yang terjadi di atas tanah milik Kasultanan Keraton Yogyakarta antara Penggugat Eka Aryawan yang merupakan pengusaha dengan para Tergugat Pedagang Kaki Lima Gondomanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lahan atas surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Keraton Yogyakarta pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 86/PDT.G/2015/PN.Yyk dan mengkaji kontradiksi yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai pengeluaran surat dengan nomor w.13/UI/5812/HK.02/X/2019 terkait pengosongan lahan yang ditempati Pedagang Kaki Lima. Metode pendekatan yang digunakan adalah yurisdis normatif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif normatif terhadap data sekunder yang kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif.

Hasil dari penelitian dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan antara Penggugat Eka Aryawan melawan para Tergugat PKL di Pengadilan Negeri Yogyakarta resmi berakhir di tahun 2019 dengan Penggugat Eka Aryawan yang memenangkan sengketa dan para Tergugat yang harus rela digusur oleh pihak pengadilan. Keluarnya surat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor w13.UI/5812/HK.02/X/2019 terkait pengosongan lahan yang ditempati PKL menimbulkan kontradiksi ditinjau dari hasil putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 86/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah adanya ketidakadilan untuk para Tergugat yang digusur oleh pihak pengadilan. Hakim tidak memberikan solusi selain melakukan pengosongan lahan yang ditempati oleh para Tergugat meski para Tergugat bukanlah Pedagang Kaki Lima liar karena sudah terdaftar di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran untuk penelitian ini adalah Panitikismo hendaknya melakukan pendataan apabila ada PKL lain yang menggunakan tanah kasultanan agar di masa mendatang tidak terjadi hal seperti ini lagi.

Kata kunci : sengketa tanah; putusan pengadilan

ABSTRACT

CONTRADICTIVE BETWEEN THE DECISION OF LAND CLEARING WITH THE AGREEMENT BETWEEN THE STUCKHOLDE AND STREET VENDORS OF GANDOMANAN IN YOGYAKARTA

Land dispute is a problem that often occurs in Indonesia. This is because the problems arising from the land sector show that many conflicts are increasingly complex, one of which is land disputes that occurred on land belonging to the Sultanate of the Palace of Yogyakarta between Plaintiff Eka Aryawan who is a businessman and Defendants, Gondomanan Street Vendors.

This study aims to determine the process of resolving land disputes over the loan for land agreement letter of the Palace of Yogyakarta in the State Court Decision Number: 86/PDT.G/2015/PN.Yyk and examining the contradiction in the decision of the Yogyakarta State Court regarding the issuance of the letter number w.13/UI/5812/HK.02/X/2019 regarding the clearing of land occupied by street vendors. The approach method used is normative jurisdiction, and the data analysis method used is normative qualitative data analysis method of secondary data which is then drawn deductive conclusions.

The results of the study explained that the settlement of land disputes between Plaintiff Eka Aryawan and PKL Defendants at the Yogyakarta State Court officially ended in 2019 with Plaintiff Eka Aryawan winning the dispute and the Defendants who had to be willing to be evicted by the court. The issuance of a letter from the Yogyakarta State Court with Number w13.UI/5812/HK.02/X/2019 regarding the clearing of land occupied by street vendors caused a contradiction in terms of the results of the Yogyakarta District Court decision Number 86/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

The conclusion from the results of this study is that there was injustice for the Defendants who were evicted by the court. The judge did not provide a solution other than clearing the land occupied by the Defendants even though the Defendants were not illegal street vendors because they were registered with the Government of the Special Region of Yogyakarta. The suggestion for this research is that Panitikismo should collect data if there are other street vendors who use the Sultanate's land so that in the future this does not happen again.

Key words: land dispute; sentence